

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rochmat Ali Syaefudin

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

[rochmatalis@gmail.com](mailto:rochmatalis@gmail.com)

Surakarta, 57127, Indonesia

### Abstract

Merit principle on implementing the management of the state civil apparatus needs to be applied, including the use of information technology. The use of information technology in public services by government agencies has increased during the corona virus (COVID-19) pandemic. The process of enforcing the civil servants discipline regulation of requires adaptation during the COVID-19 pandemic. The discipline of state civil servants in Indonesia is regulated through Government Regulation Number 53 of 2010 concerning civil servant discipline which is designed to be implemented in normal, not pandemic, conditions. The Head of The National Civil Service Agency issued Circular Letter Number 12/SE/IV/2020 as a guideline for the implementation of summons, examinations, and submission of decisions on imposing disciplinary sentences for civil servants during the COVID-19 pandemic. Information technology has been utilized in efforts to enforce discipline during the COVID-19 pandemic by using electronic mail (e-mail), instant messaging applications, and / or teleconferencing. Complete and up-to-date data is indispensable for electronic discipline. Using digital signatures can save time, money and speed up the process of resolving disciplinary offenses.

**Keywords:** *civil servant; covid-19; discipline; governance; technology*

### Abstrak

Prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara perlu diterapkan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah bertambah dalam masa pandemi virus corona (COVID-19). Proses penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil memerlukan adaptasi dalam masa pandemi COVID-19. Disiplin aparatur sipil negara di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dirancang untuk dilaksanakan pada keadaan normal, bukan pandemi. Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Edaran Nomor 12/SE/IV/2020 sebagai pedoman pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, dan penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada masa pandemi COVID-19. Teknologi informasi telah dimanfaatkan dalam upaya penegakan disiplin selama masa pandemi COVID-19 dengan penggunaan surat elektronik (e-mail), aplikasi pesan instan, dan/atau telekonferensi. Data yang lengkap dan terbaru sangat diperlukan dalam penegakan disiplin secara elektronik. Penggunaan tanda tangan digital dapat menghemat waktu, biaya, dan mempercepat proses penyelesaian pelanggaran disiplin.

**Kata Kunci:** *aparatur sipil negara, covid-19, disiplin, teknologi, pemerintahan*

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pencapaian aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law* (Wajong, 2019).

Aparatur sipil negara juga diharapkan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan publik yang belum prima, akuntabilitas aparatur yang rendah, pengawasan yang kurang terkoordinasi dan hasil pengawasan yang kurang ditindaklanjuti adalah beberapa permasalahan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia (Kastiyah & Sutrisno, 2019). Manajemen aparatur sipil negara meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan hingga pemberhentian, termasuk disiplin aparatur sipil negara.

Kesan dan citra buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari lembaga (*organization*) yang gemuk, tatalaksana (*business process*) yang kurang jelas, dan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (*human capital*) yang rendah menjadi tuntutan reformasi birokrasi (Rakhmawanto, 2017). Aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara perlu diterapkan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi merupakan sebuah paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yg lebih efektif, efisien, dan akuntabel yang telah banyak diterapkan di negara maju maupun berkembang melalui *electronic government* atau *e-government* (Rakhmawanto, 2017). *E-governance* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan badan lain dari pemerintah dengan tujuan manajemen pemerintahan yang lebih efisien dengan manfaat yang dihasilkan antara lain mengurangi korupsi (Kurniasih & Wismaningtyas, 2020).

Adopsi teknologi dalam menunjang aktivitas pemerintahan telah lama dicanangkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan instruksi presiden No. 3 tahun 2003 bahwa penerapan *e-government* diawali dengan membangun situs web pada setiap instansi pemerintahan. Konsep ini diharapkan mampu mengurai berbagai hambatan dalam proses birokrasi dan membentuk jaringan sistem manajemen serta proses kerja organisasi pemerintahan yang bekerja secara terpadu sehingga akan memudahkan terlaksananya proses pelayanan publik dan akses informasi. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan kontribusi

dalam mendukung efektivitas pemanfaatan *website* sehingga masyarakat semakin mudah mengakses aktivitas yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan (Aprilia *et.all*, 2014) dalam (Attamimi & Ahamad, 2020).

E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (Junaedi dalam (Attamimi & Ahamad, 2020). E-government menunjuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan dan pengiriman informasi pemerintah. Melalui *e- government*, pemerintah akan dikelola melalui jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Tarifu, 2020).

Upaya ini juga sebagai tindak lanjut pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai payung hukum bagi masyarakat dalam mengakomodir rasa ingin tahu mereka terhadap aktivitas pemerintahan. Dengan demikian, media *website* telah menjadi sarana yang sangat dibutuhkan. Yang mana pemanfaatannya bisa ditujukan sebagai media promosi produk-produk lokal daerah, sarana layanan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, maupun sebagai media untuk menyampaikan usulan, kritik dan keluhan (Damanik dan Purwaningsih, 2017) dalam (Attamimi & Ahamad, 2020).

Selanjutnya dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (*e-government*), *United Nation Development Program* (UNDP), sebagaimana dikutip Emil A. Lagut menyatakan *good governance* adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta demi terwujudnya kesejahteraan sosial (Susanto, 2010) dalam (Attamimi & Ahamad, 2020).

Pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, melainkan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama dengan seluruh masyarakatnya. Esensi kegiatan pembangunan adalah terjadinya perubahan sikap untuk memproyeksikan diri ke dalam situasi lain dan karena itu secara sadar dan terencana menyiapkan diri untuk melakukan perubahan untuk memperbaiki mutu hidupnya guna mengantisipasi keadaan dan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang (Mardikanto & Soebianto 2013) dalam (Attamimi & Ahamad, 2020). Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Menurut Rusli dalam Holle (2011), secara konseptual, konsep dasar dari *e- government* sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (*e-service*),

seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer, serta multimedia, melalui pengembangan *e-government* ini, dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dari persektif komunikasi, *e-Government* merupakan pemanfaatan media komunikasi berbasis internet oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat yang lebih luas dan mendapatkan umpan balik lebih cepat.

Harapannya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dapat menyelesaikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, Tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.(Attamimi & Ahamad, 2020)

Demikian halnya dengan Pandemi virus corona (COVID-19) telah menjadi pandemi dan berdampak pada semua industri, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Komalasari, 2020). Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menetapkan COVID-19 sebagai bencana non alam di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah bertambah dalam masa pandemi virus corona (COVID-19). Selama pandemi COVID-19, teknologi memainkan peran penting dalam menjaga kegiatan masyarakat tetap berfungsi, termasuk pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan (Komalasari, 2020).

## METODOLOGI

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi proses penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data sekundernya berupa jurnal, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kedisiplinan aparatur sipil negara diperlukan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Aparatur sipil negara wajib mematuhi peraturan disiplin dan pemerintah pun wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin aparatur sipil negara. Sumber daya manusia (SDM) dalam instansi pemerintah merupakan kekuatan yang menentukan bagi keberhasilan tujuan institusi negara (Rahardiansyah, 2017).

Disiplin aparatur sipil negara di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 memuat pengaturan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar batas-batas kedisiplinan dan jenis sanksi berkenaan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (Cahyadi & Parsa, 2010). Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan peraturan ini didukung dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.

Pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sudah menjadi hal yang biasa begitu banyak terjadinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Dompas, 2016). Sebagai contoh, pada awal tahun 2020 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditolak permohonan banding administratifnya oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jumlah tersebut tentu hanya sebagian dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dan dihukum. Apabila kedisiplinan telah tertanam dengan baik dalam diri aparatur sipil negara, maka budaya hukum pun dapat ditegakkan, karena aparatur sipil negara merupakan bagian dari legal struktur, yang memiliki peran dalam menciptakan efektifitas hukum suatu negara (Widiana, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dirancang untuk dilaksanakan pada keadaan normal, bukan pandemi. Pandemi COVID-19 menjadi keadaan berbeda yang dapat membuat pelaksanaan peraturan tersebut terhambat. Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Edaran Nomor 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan pedoman pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, dan penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada masa pandemi COVID-19. Ketentuan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah sangat penting karena membantu proses penyelenggaraan pemerintahan yang cepat dan mudah serta tidak terbatas dengan jarak

dan waktu (Suherman, 2020).

### **Pemanggilan**

Prinsipnya, pemanggilan untuk pemeriksaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa selama masa pandemi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hanya cara penyampaian panggilan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti surat elektronik (e-mail) atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram. Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai alamat surat elektronik dan nomor telepon aktif untuk berkomunikasi dengan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa tidak hadir secara virtual pada tanggal pemeriksaan melalui media elektronik maka dilakukan panggilan kedua. Pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam pemanggilan kedua tidak hadir kembali secara virtual.

### **Pemeriksaan**

Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dapat hadir secara virtual untuk diperiksa. Penggunaan teknologi teleconference diperbolehkan dalam kondisi pandemi COVID-19. Aplikasi telekonferensi yang saat ini populer digunakan antara lain Zoom dan Google Meet. Meskipun berlangsung secara virtual, prinsip kerahasiaan harus tetap dijaga.

Instansi pemerintah melalui pimpinan unit kerja harus memfasilitasi apabila Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa tidak memiliki sarana/prasarana yang menunjang proses pemeriksaan. Hasil pemeriksaan juga wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh atasan langsung atau tim pemeriksa, dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/IV/2020 tidak mengatur mengenai penggunaan tanda tangan digital oleh atasan langsung atau tim pemeriksa maupun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada berita acara pemeriksaan.

### **Penyampaian Keputusan**

Keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui media elektronik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, antara lain yang berupa surat elektronik (e-mail) aktif, WhatsApp, atau media elektronik lainnya.

Fitur kotak keluar (outbox) pada surat elektronik atau tangkapan layar (screenshot) pada media elektronik yang dipergunakan dapat dijadikan penanda bahwa keputusan telah disampaikan. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang menerima keputusan penjatuhan

hukuman disiplin tidak menandatangani atau menyampaikan kembali tanda terima keputusan.

### **Masa berlaku**

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/IV/2020 ini mulai berlaku sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berakhirnya pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan menjadi keuntungan dalam pelaksanaan ketentuan ini sebagai masa adaptasi apabila prosedur tersebut akan diterapkan pada masa normal.

Berbagai teknologi digital saat ini dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan dan. selama pandemi COVID-19, teknologi informasi memainkan peran penting dalam menjaga kegiatan masyarakat tetap berfungsi (Komalasari, 2020).

Pelaksanaan penegakan disiplin secara virtual pada masa normal dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dapat menghemat waktu, biaya, dan mempercepat proses penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **KESIMPULAN**

Teknologi informasi telah dimanfaatkan dalam upaya penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil selama masa pandemi COVID-19. Penerbitan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Edaran Nomor 12/SE/IV/2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat menjadi dasar hukum dan pedoman pengelola sumber daya manusia pemerintah atau pengelola administrasi kepegawaian dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil selama masa pandemi COVID-19.

Kelengkapan data identitas pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) diperlukan dalam penggunaan teknologi informasi, terutama media komunikasi antara lain alamat surat korespondensi, alamat surat elektronik (e-mail), dan nomor telepon seluler aktif. Data tersebut diperlukan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak kooperatif memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai alamat surat elektronik (e-mail) dan nomor telepon aktif untuk berkomunikasi. Perlu pengaturan lebih lanjut penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan memanfaatkan teknologi informasi pada masa normal (setelah selesai pandemi COVID-19) dan penggunaan tanda tangan digital dalam dokumen proses tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, U., & Ahamad, R. G. (2020). DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI WEBSITE TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT KADIA KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.14011>
- Cahyadi, A. A. N. A. C., & Parsa, I. W. (2010). *Penegakan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. (53), 1–7.
- Dompas, P. A. (2016). Aspek Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Lex Et Societatis*, 4(5), 62–70.
- Kastiyah, K., & Sutrisno, E. (2019). Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik. *HERMENEUTIKA*, 3(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2597>
- Komalasari, R. (2020). Manfaat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19. *Tematik*, 7(1), 38–50. <https://doi.org/10.38204/tematik.v7i1.369>
- Kurniasih, Y., & Wismaningtyas, T. A. (2020). Smart City Kota Magelang: Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance. *JIAAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 356. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2734>
- Rahardiansyah, T. (2017). Analisis Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB). *Civil Service*, 11(1), 77–93.
- Rakhmawanto, A. (2017). Pengembangan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi: Analisis Implementasi dan Hambatan. *Civil Service*, 11(2), 13–26.
- Suherman, D. (2020). Penyelenggaraan E-government di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publica*, 12(2), 101–111.
- Tarifu, L. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12511>
- Wajong, M. A. P. (2019). Tugas dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Lex Administratum*, VII(2), 23–31.
- Widiana, S. (2018). Upaya Penegakan Disiplin ASN Melalui Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. *'Adalah*, 2(7), 61–62. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i7.8398>